



Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2014

"Evaluasi Kinerja Kemdikbud Tahun 2010-2014 dan Penuntasan Implementasi Kurikulum 2013"

**Hasil Sidang Komisi VI:
Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**

TIM KOMISI VI

TOPIK BAHASAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBINAAN BAHASA

- Ketua Komisi** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
- Sekretaris** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu
- Koordinator Perumus** : Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Port Moresby
- Tim Perumus** :
1. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan
 2. Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan
 3. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 4. Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Canberra
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
 6. Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Badan Bahasa
 7. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Jambi

Anggota Komisi : 52 orang

Tim Substansi : 8 orang

HASIL

DISKUSI SIDANG KOMISI VI

SUBTOPIK 1 :

Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Pengembangan Bahasa

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1	Badan Bahasa memiliki banyak kegiatan prioritas, tetapi belum dapat dilaksanakan secara komprehensif dan masif karena keterbatasan sumber daya, terutama anggaran.	Penguatan program dan kegiatan yang didukung oleh ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan (<i>money follows function</i>)
2	Ketidakseimbangan antara jumlah tenaga profesional kebahasaan dengan cakupan objek yang ditangani	Perekrutan tenaga profesional kebahasaan dan kesastraan serta tenaga profesional pendukung
3	Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam upaya pengembangan dan pembinaan bahasa	Penyediaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pengembangan dan pembinaan bahasa
4	Kurangnya kerja sama Badan Bahasa dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penumbuhan sikap positif terhadap bahasa Indonesia	Peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait
5	Kurangnya kepedulian pengambil kebijakan dalam penanganan kebahasaan dan kesastraan	1. Konsultasi dan sosialisasi program dan kegiatan 2. Tindak lanjut aspirasi masyarakat tentang program kebahasaan dan kesastraan
6	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran bahasa	1. Sosialisasi program kebahasaan 2. Kajian interdisipliner kebahasaan

SUBTOPIK 1 :

Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Pengembangan Bahasa

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
7	Program dan kegiatan Badan Bahasa selama ini lebih kepada pemanfaatan bahasa sebagai alat komunikasi, bukan sebagai alat penguatan jati diri	Penyusunan program dan kegiatan yang diarahkan pada penguatan peran bahasa sebagai jati diri bangsa
8	Selama ini program dan kegiatan Badan Bahasa lebih banyak ditujukan untuk pembinaan masyarakat, belum menyentuh secara spesifik ke dalam dunia pendidikan	Implementasi program pembinaan bahasa dalam dunia pendidikan
9	Lemahnya sistem perencanaan program an kegiatan kebahasaan	Penguatan sistem perencanaan program dan kegiatan kebahasaan yang lebih menyentuh pada kebutuhan masyarakat

SUB TOPIK 2 :

Tindak Lanjut Kongres Bahasa Indonesia X

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1	Penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa ipteks	Pengembangan korpus bahasa Indonesia: pengayaan kosakata, pengembangan register
2	kajian kebahasaan dan kesastraan belum komprehensif	Peluasan dan pendalaman objek kajian bahasa dan sastra
3	banyak bahasa daerah yang punah dan terancam punah	Registrasi, dokumentasi, dan revitalisasi bahasa dan sastra
4	Rendahnya sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang berpengaruh terhadap kokohnya NKRI	Peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dalam rangka penguatan NKRI
5	Besarnya peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Peluasan sebaran penggunaan bahasa Indonesia: pembentukan pusat kajian BI di LN, fasilitasi pembelajaran BIPA, sertifikasi lembaga BIPA, sertifikasi pengajar BIPA
6	Undang-undang kebahasaan (No.24 Tahun 2009) belum dapat diimplementasikan secara optimal	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan regulasi kebahasaan: penyusunan perpres, PP, permen, perda2. Sinergitas dengan peraturan perundang-undangan yang lain

SUB TOPIK 2 :

Tindak Lanjut Kongres Bahasa Indonesia X

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
7	Pembelajaran bahasa Indonesia selama ini belum mampu meningkatkan kualitas peserta didik yang salah satunya ditandai dengan rendahnya nilai UN Bahasa Indonesia peserta didik di berbagai jenjang pendidikan	Penerapan paradigma baru pengajaran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan: implementasi Kurikulum 2013, penyusunan standar kompetensi BI, pengembangan media dan bahan ajar, penyusunan alat evaluasi, dan peningkatan kemampuan pendidik
8	Bahasa tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat strategi dan diplomasi halus untuk pertahanan dan keamanan negara	Penguatan kelembagaan: pembentukan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDB)

SUB TOPIK 3 :

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
1	Menurunnya minat siswa dan mahasiswa di luar negeri untuk belajar bahasa Indonesia (kasus: Australia)	Promosi dan peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri
2	Penutupan Sekolah RI di luar negeri (Kasus: Ryadh, Saudi Arabia)	Diplomasi tingkat pimpinan negara
3	Pelarangan pembelajaran bahasa Indonesia oleh pemerintah asing terhadap warganya (kasus: Saudi Arabia)	Diplomasi tingkat pimpinan negara
4	Penyelenggaraan pengajaran dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia bagi warga negara asing yang akan belajar atau bekerja di Indonesia	Pelayanan BIPA dan dan pelaksanaan UKBI serta sertifikasi lembaga dan pengajar BIPA ditangani oleh Badan Bahasa, Kemendikbud
5	Meningkatnya keingintahuan dan minat belajar warga Papua Nugini terhadap bahasa Indonesia	Fasilitasi pembelajaran BIPA (penyediaan bahan ajar dan tenaga pengajar bahasa Indonesia)

SUB TOPIK 3 :

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

No	Isu Strategis	Rencana Aksi dan Komitmen (SOLUSI)
6	Maraknya konflik antaretnik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan bahasa	Kajian kebahasaan untuk perdamaian dan penanganan konflik
7	Belum memadainya jumlah penerjemah profesional untuk pemenuhan kepentingan strategis di era global	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1012 539 1566 582">1. pelaksanaan penerjemahan<li data-bbox="1012 589 1649 682">2. pelatihan penerjemah dan calon penerjemah<li data-bbox="1012 689 1862 782">3. Penanganan sandi kebahasaan dan linguistik forensik

TERIMAKASIH